

## FAKTOR PENDORONG KONFLIK KELOMPOK TALIBAN DALAM PENGAMBILALIHAN PEMERINTAHAN AFGHANISTAN TAHUN 2021

Ali Martin<sup>1</sup>, Muhamad Wahyu Saputro<sup>2</sup>

*Jurusan Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Wahid Hasyim  
[alimartin@unwahas.ac.id](mailto:alimartin@unwahas.ac.id)*

### **Abstract**

*This research discusses the activities of the Taliban in taking over the governance of Afghanistan. The Taliban considers the Afghan government unfit to lead the country of Afghanistan. Therefore, the Taliban carried out a coup against the Afghan government because of their dissatisfaction with the Afghan government so they wanted a new government from Afghanistan. The research method that the author uses is a qualitative descriptive research method, in which this type of research describes as well as explains the phenomena, symptoms, events, or events that are happening at this time. The author also uses the theory between the main causes of internal conflict (the underlying causes of conflict) and the proximate causes of conflict according to Michael E. Brown. In this theory there are several factors that cause internal conflict, including structural, political, economic/social, and socio-cultural. These factors are related to the fragility of the government's legitimacy and the condition of the Afghan military, the Taliban's strategy in taking several areas in Afghanistan, the weakening of the Afghan economy, and the existence of an ideological doctrine from the Taliban which has caused public distrust of the Afghan government.*

**Keywords:** *Interests of the Taliban, Governance, Internal Conflict*

### **Abstrak**

*Penelitian ini membahas tentang aktivitas Taliban dalam mengambil alih pemerintahan Afghanistan. Taliban menilai pemerintah Afghanistan tidak layak memimpin negara Afghanistan. Oleh karena itu, Taliban melakukan kudeta terhadap pemerintah Afghanistan karena ketidakpuasan mereka terhadap pemerintah Afghanistan sehingga menginginkan pemerintahan baru dari Afghanistan. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode penelitian deskriptif kualitatif, dimana jenis penelitian ini menggambarkan sekaligus menjelaskan fenomena, gejala, peristiwa, atau peristiwa yang sedang terjadi saat ini. Penulis juga menggunakan teori antara penyebab utama konflik internal (the underlying cause of conflict) dan penyebab langsung konflik menurut Michael E. Brown. Dalam teori ini terdapat beberapa faktor penyebab konflik internal, antara lain struktural, politik, ekonomi/sosial, dan sosial budaya. Faktor-faktor tersebut terkait dengan rapuhnya legitimasi pemerintah dan kondisi militer Afghanistan, strategi Taliban dalam merebut beberapa wilayah di Afghanistan, melemahnya perekonomian Afghanistan, dan adanya doktrin ideologi dari Taliban yang menimbulkan dampak buruk bagi masyarakat. ketidakpercayaan terhadap pemerintah Afghanistan.*

**Kata Kunci :** *Kepentingan Taliban, Pemerintahan, Konflik Internal*

## **A. PENDAHULUAN**

Afghanistan merupakan negara yang terletak di kawasan Asia Selatan yang tidak pernah lepas dari berbagai dinamika konflik, seperti perebutan kekuasaan, kekerasan, dan persaingan

ekonomi. Ketegangan politik yang terjadi seakan-akan menjadi bagian yang tidak bisa di pisahkan dari sejarah perkembangan Afghanistan.<sup>1</sup>

Taliban merupakan kelompok yang terbentuk pada tahun 1994 yang bertujuan untuk menentang ketidakstabilan politik, korupsi, serta kejahatan-kejahatan yang terjadi di Afghanistan pasca penarikan Uni Soviet dari Afghanistan.<sup>2</sup> Taliban berideologi Sunni Deobandi serta memiliki garis ideologi pemikiran Wahabi yang bertujuan untuk membentuk pemerintahan sesuai tuntunan syariat Islam. Paham Deobandi muncul dari gerakan revivalis sunni yang kemudian mendirikan madrasah Islam bernama Darul Ulum Deobandi pada tahun 1866.<sup>3</sup> Kelompok Taliban mulai menyebarkan ideologinya dari madrasah ke madrasah sampai ke masyarakat sehingga sebagian besar wilayah Afghanistan dikuasai oleh kelompok Taliban Taliban berjanji di wilayah etnis pashtun yang tersebar di Afghanistan untuk mengembalikan perdamaian dan keamanan berdasarkan syariah Islam jika mereka berkuasa. Pengaruh Taliban sangat cepat menyebar hingga berhasil merebut ibukota Afghanistan, Kabul pada tahun 1996.<sup>4</sup> Kekuasaan Taliban runtuh pada tahun 2001 karena serangan militer AS. AS menuduh Taliban melindungi Osama Bin Laden dan gerakan Al-Qaeda yang dianggap bertanggung jawab atas serangan di Gedung World Trade Centre, New York pada September 2001. Taliban melakukan pemberontakan setelah kekuasaannya digulingkan oleh AS, mereka melakukan taktik perang gerilya selama 20 tahun melawan pasukan AS, sekutunya dan tentara Afghanistan. Sementara pasukan pemerintah menguasai wilayah perkotaan, Taliban mempertahankan kendali wilayah pedalaman atas dukungan penduduk setempat terutama dari etnis pashtun di selatan dan di timur negara Afghanistan.<sup>5</sup>

Pada tahun 2020-2021 tepatnya pada masa kepemimpinan Presiden Asraf Ghani berbagai dinamika konflik terjadi baik dari sistem pemerintahan yang bertolak belakang dengan harapan masyarakat Afghanistan maupun kestabilan ekonomi dan keamanan negara yang melemah. Pemerintah kurang bertanggung jawab dalam melakukan kinerjanya sehingga

---

<sup>1</sup>Liza Umami, "Analisa Politik Luar Negeri Afghanistan Terhadap Indonesia Dalam Upaya Mediasi Konflik Afghanistan Tahun 2017-2019", *Skripsi*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2020, hal. 2

<sup>2</sup>Durrotun Nafisah, "Afghanistan Di Bawah Pemerintahan Taliban Tahun 1996-2001 M", *Skripsi*, Fakultas Adab Dan Humaniora Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya 2019, hal. 53

<sup>3</sup>Rafika Wahyu Andani, "Segitiga Kekerasan, Ham, Dan Perempuan Afghanistan Era Kepemimpinan Taliban", *Jurnal Pena Wima Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta Program Study Hubungan Internasional*, Volume 2, No. 1, 2021, hal. 76

<sup>4</sup>www.bbc.com, "Siapa yang Taliban? Sejarah kelompok yang kini menguasai kembali Afghanistan", Senin, 16 Agustus 2021, <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-58200920>. diakses pada Jum'at, 3 Juni 2022

<sup>5</sup>Kadek Surya Alit Dharma Putra, "Aneksasi Afghanistan Terhadap Taliban Tahun 2021", *Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum*, Vol 4. No. 3, 2021, Hal. 917

sebagian besar masyarakat mendukung langkah Taliban dalam merebut kekuasaan pemerintah Afghanistan.<sup>6</sup> Pada tahun 2018 Taliban terlibat pembicaraan dengan AS (Amerika Serikat) dan pada 29 Februari 2020 kedua belah pihak bersepakat menandatangani kesepakatan damai di Doha yang berisi komitmen AS untuk menarik pasukan dan Taliban tidak melakukan serangan pada pasukan AS. Dalam kesepakatan itu, Al-Qaeda atau militan lain juga tidak di ijin beroprasi di area yang dikuasanya, dan melanjutkan perjanjian perdamaian nasional. Pada tanggal 17 November 2020 Amerika Serikat menarik mundur pasukan militernya dari Afghanistan atas perintah Presiden Joe Biden karena tugas atau misi pasukan Amerika Serikat telah selesai. Hingga pada tanggal 31 Agustus 2021.<sup>7</sup> Setahun setelah perjanjian damai ditekan tepatnya 29 Februari 2020, Taliban terus menerus menargetkan serangan ke pasukan keamanan Afghanistan dan dengan cepat menyerang berbagai wilayah di seluruh negeri hingga menduduki ibu kota Kabul tepatnya pada 15 Agustus 2021 dan membuat Presiden Afghanistan, Ashraf Ghani meninggalkan Afghanistan dengan alasan menghindari pertumpahan darah<sup>8</sup>. Taliban menganggap pemerintah Afghanistan tidak layak untuk memimpin negara Afghanistan. Oleh karena itu, kelompok Taliban melakukan kudeta terhadap pemerintah Afghanistan karena ketidakpuasan mereka terhadap pemerintahan Afghanistan sehingga mereka menginginkan pemerintahan yang baru dari Afghanistan. Dari permasalahan tersebut maka diperlukan penelitian untuk mengetahui alasan mengapa kelompok Taliban mengambil alih pemerintahan Afghanistan pada tahun 2021.

Menurut Michael E. Brown konflik internal merupakan sengketa politik yang bersifat kekerasan atau pertikaian politik yang penyebab utamanya karena faktor domestik daripada faktor sistemik, di mana kekerasan bersenjata terjadi dan mengancam sebagian besar di dalam perbatasan satu negara<sup>9</sup>. Dalam penelitian ini penulis menggunakan istilah konflik internal karena pihak-pihak yang berkonflik memang ada di suatu negara, tetapi cakupannya di seluruh dunia tetap menjadi perhatian mengingat seberapa besar pengaruhnya terhadap kerangka sistem politik global.

---

<sup>6</sup> Poltak Partogi Nainggalon, “Taliban Merebut Kembali Kekuasaan di Afghanistan”, *Jurnal Info Singkat*, Vol.8 No. 16, 2021, hal. 8-9

<sup>7</sup> Yon Machmudi, “*Era Baru Afghanistan: Invasi Barat Hingga Kemenangan Taliban*”, (Jakarta: Gema Insani, 2021), hal. 125

<sup>8</sup> Boy Anugrah & Jabinson Purba, “Kondisi Politik dan Keamanan Afghanistan di Bawah Rezim Taliban dan Signifikansinya Terhadap Geopolitik Global”, *Jurnal Kajian Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia*, Vol.9 No. 3, hal 25-28, 2021

<sup>9</sup> Alexius Jemadu, “*Politik Global dalam Teori & Praktik*”, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008, hal. 187

Michael E. Brown telah mengemukakan teori untuk menjelaskan sebab-sebab terjadinya *intra-state conflict* atau konflik internal agar penulis dapat memahami dan menjawab kompleksitas konflik internal yang tidak dapat dijelaskan secara memadai oleh satu faktor atau variabel. Dari hal tersebut, Michael E. Brown membedakan antara *the underlying causes of conflict* dan *the proximate causes of conflict*. Brown menggarisbawahi bagaimana tindakan atau kebijakan para pemimpin elit dapat bertindak sebagai katalis untuk meletusnya perang di suatu wilayah dan tidak membantah bahwa suatu daerah lebih rentan terhadap konflik karena alasan struktural, politik, ekonomi, sosial, dan budaya<sup>10</sup>.

Tabel 1. Sebab-sebab Utama dan Sebab-sebab Pemicu Konflik Internal

<b>Sebab-sebab Utama (<i>Underlying Causes</i>)</b>	<b>Sebab-sebab Pemicu (<i>Proximate Causes</i>)</b>
<i>Faktor-faktor Struktural</i>	<i>Faktor-faktor Struktural</i>
Negara yang lemah	Negara yang sedang runtuh/gagal
Kekhawatiran tentang keamanan internal	Perubahan perimbangan kekuatan militer
Geografi etnis	Perubahan pola-pola demografis
<i>Faktor-faktor Politik</i>	<i>Faktor-faktor Politik</i>
Lembaga politik yang diskriminatif	Transisi politik
Ideologi nasional yang eksekutif	Ideologi eksklusif yang semakin berpengaruh
Politik antar kelompok	Persaingan antar kelompok yang semakin tajam, Pertarungan kepemimpinan yang semakin tajam
<i>Faktor Ekonomi/Sosial</i>	<i>Faktor Ekonomi/Sosial</i>
Masalah ekonomi	Masalah ekonomi yang makin parah
Sistem ekonomi yang diskriminatif	ketimpangan ekonomi yang makin lebar
Pembangunan ekonomi dan modernisasi	Pembangunan ekonomi dan modernisasi
<i>Faktor Sosial Budaya</i>	<i>Faktor Sosial Budaya</i>
Pola diskriminasi budaya	Pola diskriminasi budaya yang semakin kuat
Sejarah kelompok yang bermasalah	Penghinaan etnis dan propaganda

## **B. METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian Deskriptif kualitatif, dimana penelitian ini menggambarkan sekaligus menjelaskan mengenai fenomena, gejala,

<sup>10</sup> *Ibid*, hal. 204-205

peristiwa, atau kejadian yang terjadi saat ini. Pendekatan kualitatif menurut Creswell, adalah proses penelitian dan pemahaman yang didasarkan pada teknik yang mengeksplorasi fenomena sosial atau masalah manusia<sup>11</sup>. Dalam penelitian ini, peneliti memperoleh informasi dengan cara membuat gambaran yang kompleks, mencari serta mengumpulkan data yang spesifik dari beberapa sumber yang terpercaya.

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah study literature (library riset), adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca, mencatat,serta mengelola bahan penelitian<sup>12</sup>. Dengan adanya data-data yang sudah diolah menjadi data baru oleh orang lain. Penelitian ini berdasarkan data sekunder yang didapat dari riset terdahulu, buku, jurnal, berita, artikel, internet, dokumen-dokumen, dan bentuk tulisan lainnya yang mendukung dan relevan dengan objek penelitian. Berdasarkan sumber-sumber tersebut penelitian mengumpulkan data sebanyak banyaknya yang kemudian dipilih agar sesuai dengan sistematika penulisan.

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Gambaran Umum Afghanistan**

Afganistan merupakan negara yang terletak di benua Asia. Afghanistan adalah negara yang diapit daratan perbatasan dengan Iran di barat, Turkmenistan, Uzbekistan, dan Tajikistan di utara, perbatasan kecil dengan Cina di timur laut, dan Pakistan di timur dan selatan. Luas totalnya sebesar 652.230 km<sup>2</sup>. Afganistan berpenduduk 30 juta jiwa dan mayoritas penduduk Afghanistan adalah Muslim, sekitar 85% Sunni dan 15% Syiah. Terjadinya perang Afganistan yang menyebabkan ekonominya macet, sehingga Afghanistan merupakan salah satu negara yang hidup di bawah garis kemiskinan. Perekonomian Afghanistan menerima bantuan besar asing, dengan total miliaran dolar AS setiap tahun. Hal tersebut telah mengalami pemulihan, sebagian dengan mengembalikannya lebih dari lima juta ekspatriat dan proyek konstruksi baru<sup>13</sup>.

---

<sup>11</sup> Eko Murdiyanto, “*Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Aplikasi Contoh Proposal*”, Yogyakarta: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta Press, 2020, hal. 19

<sup>12</sup> Mestika Zed, “*Metode Penelitian Kepustakaan*”, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014, hal.3

<sup>13</sup> Kaiva Azria dan Erma Ramayani, “Sejarah Perang Afghanistan Dari Dulu Hingga Kini”, *jurnal PIR*, Vol. 6 No. 2, 2022, hal. 127

## 2. Gambaran Umum Taliban

Taliban adalah faksi religius dan politik ultrakonservatif yang berkembang di Afghanistan pada pertengahan tahun 1990. Dalam bahasa Pashto, "Taliban" memiliki arti "siswa atau pelajar". Hal ini merujuk pada anggota kelompok yang pernah belajar di bawah Mullah M. Omar. Mullah M. Omar sendiri merupakan pendiri Taliban dan menjadi komandan pasukan mujahidin untuk mendorong Uni Soviet keluar dari Afghanistan pada 1989. Mullah M. Omar telah mendirikan sebuah gerakan yang disebut Taliban bersama lima puluh murid tersebut pada September 1994<sup>14</sup>. Sementara kelahiran Taliban pada 1994 tidak lepas dari ketidakstabilan politik dalam negeri setelah penarikan Uni Soviet. Mullah M. Omar membentuk Taliban dengan tujuan untuk menentang ketidakstabilan, korupsi, dan kejahatan di Afghanistan. Janji mereka adalah memulihkan perdamaian dan keamanan, serta menegakkan syariah atau hukum Islam versi mereka setelah berkuasa<sup>15</sup>.

## 3. Proses Pengambilalihan Kekuasaan Afghanistan oleh Taliban

Taliban memulai aksi dengan melakukan serangan di daerah Kandahar dan berhasil menaklukkan seorang panglima perang setempat kemudian melakukan gerakan mengambil alih daerah sekitarnya. Pada awal tahun 1995, Taliban berhasil menguasai bagian selatan Afghanistan dan berencana untuk memperluas targetnya yaitu mengalahkan Kabul. Taliban memiliki keinginan untuk menjadikan Afghanistan sebagai negara yang menerapkan syari'at Islam<sup>16</sup>.

Taliban telah berhasil menguasai dan merebut Afghanistan pada 15 Agustus 2021 lalu. Kemudian kelompok bersenjata menyebar ke seluruh ibukota dan memasuki istana presiden. Kejadian tersebut juga mengakibatkan Ashraf Ghani melarikan diri ke luar negeri. Dalam konferensi persnya, Taliban membuat jaminan kepada warga Afghanistan dan dunia, termasuk mengklaim tidak melakukan serangan balas dendam terhadap siapa pun yang bekerja dengan Amerika Serikat. Taliban akan bekerja dengan perempuan, tetapi dengan batas-batas hukum syariah. Konferensi itu dilakukan setelah mereka menguasai Kota Kabul yang menyebabkan ribuan warga Afghanistan berusaha melarikan diri dari negara itu. Untuk itu, Taliban berusaha meyakinkan masyarakat yang ketakutan kalau mereka akan kembali membawa hukum dan

---

<sup>14</sup> *Ibid*, hal. 128

<sup>15</sup> <https://internasional.konten.co.id/>, "Sejarah Taliban, Kelompok yang Kini Menguasai Afghanistan", <https://internasional.kontan.co.id/news/ini-sejarah-taliban-kelompok-yang-kini-menguasai-afghanistan-1> diakses pada 4 Februari 2023

<sup>16</sup> Yon Machmudi, *Op. Cit*, hal.71

ketertiban ke Afghanistan. Mereka berjanji kengerian dari aturan sebelumnya tidak akan terulang lagi. Mujahid mengatakan, mereka akan memastikan keamanan semua kedutaan asing dan organisasi bantuan. Ketika ditanya tentang status hak-hak perempuan dan kebebasan pers di bawah Taliban, Mujahid menegaskan, baik perempuan dan media akan dapat berpartisipasi dalam masyarakat sesuai dengan hukum syariah<sup>17</sup>.

Semenjak peralihan kekuasaan ke tangan Taliban, Taliban akan membawa perbaikan bagi Afghanistan yang pada masa itu terjadi ketiakstabilan dalam pemerintah, tetapi Taliban dengan tegas memberikan perintah yang salah tafsir dalam hukum Islam. Taliban menghadapi perlawanan yang signifikan, terutama setelah menegaskan interpretasi hukum dan ketertibannya sendiri. Kebijakannya termasuk pengecualian hampir total perempuan dari kehidupan publik (termasuk pekerjaan dan pendidikan), penghancuran sistematis peninggalan seni non-Islam seperti yang terjadi di kota Bamiyan, dan penerapan hukuman pidana yang keras. Taliban memperkenalkan atau mendukung hukuman sesuai dengan interpretasi ketat mereka terhadap hukum syariah seperti eksekusi publik terhadap pelaku pembunuhan dan pezina, serta amputasi bagi mereka yang dinyatakan bersalah atas pencurian. Pria diharuskan menumbuhkan janggut dan wanita harus mengenakan burka yang menutupi semua mulai dari kepala hingga kaki. Taliban juga melarang televisi, musik dan bioskop, dan tidak menyetujui anak perempuan berusia 10 tahun ke atas pergi ke sekolah. Kemudian, wanita tidak lagi diizinkan melakukan perjalanan jauh tanpa pendamping pria dan, meskipun tidak diharuskan mengenakan burka, telah diperintahkan untuk menutupi wajah mereka di depan umum. Kebanyakan wanita tidak diperbolehkan bekerja<sup>18</sup>.

## **5. Faktor Pendorong Konflik Kelompok Taliban Dalam Mengambil Alih Pemerintahan Afghanistan Tahun 2021**

Taliban dalam mengambil alih kekuasaan Afghanistan, yang pada dasarnya demikian kompleks dan melibatkan banyak faktor. Faktor-faktor tersebut meliputi dari gerakan yang dilakukan oleh bagian-bagian eksternal yaitu Amerika Serikat (AS) sebagai bagian yang paling berkepentingan di Afghanistan, sampai hal-hal yang berkaitan dengan rapuhnya legitimasi pemerintah dan kondisi militer Afghanistan. Dari faktor eksternal dan internal itulah yang akan menjadi jawaban atas persoalan pokok kemenangan Taliban dalam mengambil alih kekuasaan

---

<sup>17</sup> Ahmad Fuadi, "Peran United Nations Assistance Mission in Afghanistan dalam Memberikan Perlindungan Hak Asasi Manusia di Afghanistan pada Tahun 2009", *Jom FISIP*, Vol. 1 No. 2, hal. 7

<sup>18</sup> Yon Machmudi, *Op. Cit.*, hal. 75-76

Afghanistan. Dengan demikian, untuk mengetahui faktor pendorong konflik kelompok Taliban dalam mengambil alih pemerintahan Afghanistan, penulis akan mendeskripsikan kepentingan serta proses Taliban dalam mengambil alih pemerintahan Afghanistan dengan menggunakan teori penyebab konflik internal menurut Michael E. Brown yang meliputi faktor struktural, politik, ekonomi, sosial, dan budaya.

#### **a. Struktural**

Pasukan militer yang dikirimkan pemerintahan AS dengan tujuan untuk memenangkan perang, termasuk menghancurkan ISIS, menghancurkan Al-Qaeda, dan mencegah Taliban mendapatkan lebih banyak kekuatan<sup>19</sup>. Dinamika konflik yang terjadi memberikan keuntungan bagi Taliban yang mengakibatkan perluasan distrik oleh Taliban secara signifikan pada tahun 2021, yaitu ketika Taliban berhasil menguasai 75 distrik, 187 dalam status diperdebatkan dan 133 distrik berada di bawah kendali pemerintah Afghanistan. Jumlah distrik yang dikuasai Taliban dan jumlah distrik yang terlepas dari kendali pemerintah Afghanistan akan meningkat sebagai akibat dari kecepatan Taliban merebut kendali distrik di Afghanistan pada tahun 2021. Berikut grafik perkembangan adalah status distrik di Afghanistan pada tahun 2021. Pada Agustus 2021 banyak kota di Afghanistan yang mulai jatuh ke tangan Taliban yaitu kota Zarani, Sheberghan, Kunduz, Taloqan, Aybak, Pul-E-Khumri, Faizabad, Ghazni, Firus Koh, Qala-E-Naw, Kandahar, dan Lashkhar. Kemudian masih terdapat beberapa kota yang masih diperdebatkan Taliban kepada Afghanistan agar bisa menjadi kota dibawah kekuasaannya yaitu Farah, Herat, dan Pul-E-Alam<sup>20</sup>.

Pada tahun 2019, kepemimpinan Ghani di periode kedua, hingga akhirnya mengambil kebijakan meninggalkan kursi pemerintahan Afghanistan setelah Taliban menduduki istana negara pada tanggal 15 agustus 2021. Setelah pendudukan milisi Taliban, Ashraf Ghani mengambil keputusan untuk pergi meninggalkan Afghanistan ke negara yang lebih aman baginya yakni Tajikistan, Uzbekistan, Oman yang kemudian muncul ke publik, dan bicara dari lokasi pengasingannya di Uni Emirate Arab. Ashraf Ghani sebenarnya meninggalkan Afghanistan dengan alasan untuk mencegah pertumpahan<sup>21</sup>. Hal yang menarik adalah Ashraf Ghani dengan berani mengakui bahwa terlepas dari komitmennya untuk memimpin

---

<sup>19</sup> <https://cisac.fsi.stanford.edu/>, "Taliban Afghanistan", <https://cisac.fsi.stanford.edu/mappingmilitants/profiles/afghan-taliban>, diakses pada 17 Mei 2023

<sup>20</sup> <https://www.longwarjournal.org/>, "Mapping Taliban Control in Afghanistan", <https://www.longwarjournal.org/mapping-taliban-control-in-afghanistan>, diakses pada 17 Mei 2023

<sup>21</sup> Khotibul Umam, "Kebijakan Ashraf Ghani Terhadap Kembali Berkuasanya Kelompok Taliban di Afghanistan Tahun 2021", *International Conference on Islam, Law, and Society*, Vol. 1 No.1, 2021, hal. 262-263

Afghanistan menjadi negara yang lebih demokratis, tenang, aman, dan maju, dia belum berhasil dan gagal terutama dalam memastikan stabilitas dan kemakmuran, seperti yang dihadapi oleh pemerintah yang sebelumnya. Dia mengklaim sangat berhati-hati dengan keuangan pribadinya, bahkan mendaftarkan semua kepemilikannya secara terbuka, dan siap untuk mengevaluasi semua aset oleh PBB dan auditor independen lainnya<sup>22</sup>. Ini masih mengacu pada klaim penggelapan uang negara. Selain itu, Ashraf Ghani menyatakan dukungannya untuk pembicaraan dengan Taliban, seperti yang sudah disebutkan. Ashraf Ghani menekankan pentingnya mengutamakan stabilitas dalam salah satu konferensi ilmiahnya, terutama saat menangani beberapa diskusi dan kesepakatan damai. Pengalamannya sebagai sebagai akademisi dan praktisi politik tampaknya memiliki pengaruh yang signifikan terhadap isu-isu ini<sup>23</sup>.

#### **b. Politik**

Krisis politik di Afghanistan yang terjadi sejak 2021, hal tersebut berdampak terhadap instabilitas politik Afghanistan secara domestik serta menimbulkan implikasi yang sifatnya regional dan global. Terdapat penyebab terjadinya krisis politik yang terjadi di Afghanistan, pertama adalah penarikan mundur pasukan Amerika Serikat (AS) setelah menduduki Afghanistan selama dua puluh tahun lamanya pasca invasi pada 2001. Adanya perubahan politik Afghanistan ketika AS bernegosiasi dengan Taliban dengan tujuan mengakhiri konflik antar pihak yang sedang terjadi seperti menyepakati penarikan AS dan menyelesaikan masalah politik antara Taliban dan Republik. Bentuk kemenangan Taliban adalah terjadinya perjanjian damai yang dilakukan antara Taliban dan Amerika Serikat pada 29 Februari 2020 di Doha, Qatar. Terdapat empat poin pokok di dalam perjanjian tersebut antara lain:

- a) Keharusan Taliban untuk memastikan Afghanistan bukan tempat untuk bersemayam kelompok Amerika Serikat dan sekutu, serta tidak ada lagi unsur penyerangan terhadap kepentingan Amerika Serikat dan sekutu.
- b) Pihak Amerika Serikat dan sekutu akan menarik mundur pasukan dari Afganistan dalam kurun waktu 2 tahun serta membebaskan 5000 tahanan perang anggota Taliban dan 10.000 tahanan lainnya pada 10 maret 2020.

---

<sup>22</sup> <https://www.voaindonesia.com/>, “Ghani Mengaku Lari dari Afghanistan untuk Hindari Pertumpahan Darah”, <https://www.voaindonesia.com/a/ghani-mengaku-lari-dari-afghanistan-untuk-hindari-pertumpahan-darah-/6218093.html>, diakses pada 5 Mei 2023

<sup>23</sup> *Ibid*,

- c) Akan dilakukannya sebuah perundingan antara Taliban dan Pemerintah Afghanistan terkait bentuk Afganistan kedepannya.
- d) Terjadinya gejatan senjata antara Pemerintah Amerika Serikat dan Taliban<sup>24</sup>.

Penyebab kedua terjadinya krisis politik yang terjadi di Afghanistan adalah strategi Taliban yang memanfaatkan kelemahan rezim pemerintahan Ashraf Ghani. Mundurnya pasukan AS dari Afghanistan dan kaburnya Presiden Ashraf Ghni menyebabkan kekosongana pemerintahan Afghanistan. Hal tersebut dimanfaatkan Taliban untuk mengambil alih kekuasaan dengan mudah. Beberapa kota di Afghanistan mulai jatuh ditangan Taliban seperti Kandahar, Ghazni, serta pada 15 Agustus Taliban berhasil merebut Kabul serta menduduki Gedung Kepresidenan sebagai kemenangan atas beralihnya kekuasaan di Afghanistan. Pada Sepetember 2021, Taliban merayakan kemenangan mereka dan mengambil alih siaran televisi dan radio untuk mendeklarasikan kemenanagan serta menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan langkah untuk menjalankan kekuasaan seanjutnya sebagai strategi meraka dalam membuktikan adanya perubahan sikap serta komitmen dalam membangun kerjasama dengan pihak lain untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat Afghanistan<sup>25</sup>.

Beberapa kasus yang terjadi dalam negara yang sedang mengalami konflik maupun permasalahan, dimana sistem pemerintahannya masih lemah, kemudian masalah korupsi yang membuat dampak buruk terhadap institusi negara serta pengakkan supermasi hukum. Pemerintah yang kurang mampu dalam mengontol beberapa proyek yang diberikan anggaran oleh lembaga setempat dengan tidak sengaja mampu memberikan celah bagi para koruptor untuk menyelewengkan anggaran yang akhirnya menambah panjang bagi pejabat negara yang terlibat dalam korupsi. Tindakan suap maupun korupsi akan menjadi budaya yang melakat dalam lingkaran elite kekuasaan yang dapat menyebabkan pandangan buruk dikalangan masyarakat. Seperti potensi korupsi yang terjadi di Afghanistan menjadikan rapuhnya Pemerintahan Afghanistan sehingga menghilangkan rasa kepercayaan rakyat terhadap pemerintah<sup>26</sup>. Semenjak Taliban berkuasa, keadaan politik di Afghanistan mengalami perubahan. Sistem politik sekarang berbasis demokrasi dengan keyakinan bahwa sistem tersebut akan membawa perdamaian bagi Afghanistan. Masa ini dapat disebut sebagai masa transisi demokratis di Afghanistan. Selama masa transisi demokratis tersebut Taliban tidak

---

<sup>24</sup> Yon Machmudi, *Op. Cit*, hal. 112-114

<sup>25</sup> <https://www.researchgate.net>, “Krisis Afghanistan dan Implikasi Terhadap Politik Global”, [https://www.researchgate.net/publication/362709803\\_Krisis\\_Afghanistan\\_dan\\_Implikasi\\_Terhadap\\_Politik\\_Global](https://www.researchgate.net/publication/362709803_Krisis_Afghanistan_dan_Implikasi_Terhadap_Politik_Global) diakses pada 8 Februari 2023

<sup>26</sup> Yon Machmudi, *Op. Cit*, hal. 132-133

mendapatkan tempat yang khusus di panggung politik nasional. Namun, pada tahun 2021 setelah mundurnya Amerika Serikat, Taliban membentuk jejaring kekuatan di wilayah yang menjadi modal ketika mereka mulai ke panggung politik. Secara internal, Taliban di munculkan dengan adanya faksi-faksi yang membuat mereka melakukan konsolidasi sendiri. Taliban akan membangun sistem politik sendiri yaitu dengan berbasis syari'at islam yang dibuktikan adanya sistem pemerintahan, dimana Taliban tidak akan mengguakan demokrasi karena hal tersebut bertentangan dengan syari'at islam. Kemudian berkaitan dengan pembagian kekuasaan, Taliban mengonsentrasikan kekuasaan pada kelompok Pashtun yang terdiri dari 33 pejabat, 2 dari suku Tajik, dan 1 orang dari suku Uzbek<sup>27</sup>.

### **c. Ekonomi**

Perubahan politik Afghanistan akan terjadi pada tahun 2021 ketika negara tersebut memiliki kebutuhan yang signifikan akan pembangunan dan infrastruktur kemanusiaan. Ketidakpastian politik yang ada dan terus menambah tantangan yang dihadapi warga biasa karena otoritas de facto saat ini tidak diakui secara internasional. Situasi ekonomi memburuk dari tingkat yang sebelumnya tinggi. Taliban serta organisasi internasional menyadari perlunya tindakan segera untuk mengurangi perlambatan pertumbuhan ekonomi di sektor sosial. Dukungan dana serta pembangunan infrastruktur dari Amerika Serikat (AS) yang tidak dimanfaatkan dengan baik dalam membentuk sebuah pemerintah yang kuat, efektif, dan efisien. Sehingga Taliban beserta masyarakat Afghanistan merasa kecewa dengan pemerintahan Afghanistan. Kepentingan Taliban dalam mengambil alih pemerintahan Afghanistan disebabkan karena melemahnya ekonomi Afghanistan. Keinginan Taliban dalam hal tersebut karena Taliban melihat banyaknya masyarakat miskin disertai dengan pemerintah yang korupsi, dan konflik yang berkelanjutan<sup>28</sup>.

Kemudian statistik terbaru yang tersedia untuk tahun 2021 menunjukkan kondisi ekonomi memburuk dengan cepat dan tajam. Ekonomi akan mengalami penurunan sebesar yakni sekitar 20% setelah pengambilalihan wilayah Kabul. Selain itu, cadangan devisa bank sentral Afghanistan yang disimpan di luar negeri telah dibekukan sementara organisasi internasional dan donor lainnya menghentikan pencairan yang direncanakan. Perekonomian sedang menghadapi guncangan dari penurunan bantuan secara tiba-tiba yang telah

---

<sup>27</sup> *Ibid*, hal. 179-180

<sup>28</sup> Unit Nations Development Programme Afghanistan, “*Afghanistan: Socio-Economic Outlook 2021-2022*”, Afghanistan: UNDP Afghanistan County Office, 2021, hal. 4

menyebabkan kekurangan uang tunai, dengan penarikan bank-bank lokal yang dibatasi dan sektor perbankan yang melemah<sup>29</sup>. Mata uang Afghanistan melemah sebesar 7%, inflasi meningkat, terutama pada bahan makanan, minyak goreng dan bahan bakar, perdagangan telah menurun, dan banyak dari listrik yang diimpor negara itu masih belum dibayar. Efek ini terjadi ketika ekonomi sudah menurun sejak tahun 2020 dan, dalam kombinasi dari kekeringan parah yang diperkirakan, efek berkelanjutan dari pandemi COVID-19 dan transisi politik yang tidak tuntas<sup>30</sup>.

Kondisi ekonomi Afghanistan pada Agustus 2021 memburuk dengan cepat dan tajam. Ekonomi sudah mengalami penurunan sebelumnya dan PDB turun sekitar 2% pada tahun 2020. Meskipun ukuran dan durasinya masih harus ditentukan, penurunan bantuan yang tiba-tiba akan semakin menurunkan tingkat PDB dan mengurangi prospek pertumbuhan ekonomi. Selain itu, hingga saat ini, Departemen Keuangan AS telah membekukan sekitar US\$9 miliar cadangan bank sentral Afghanistan (Da Afghanistan Bank: DAB), jumlah yang dapat menopang impor selama sekitar 15 bulan<sup>31</sup>. Pertumbuhan ekonomi tidak akan menjadi positif dalam waktu dekat kecuali beberapa kondisi terpenuhi, termasuk:

1. Penghapusan pembatasan pekerjaan perempuan.
2. Bantuan penanggulangan COVID-19 sebesar US\$250 juta per tahun terus berlanjut.
3. Pelonggaran sanksi untuk memungkinkan bantuan kemanusiaan.

Lemahnya kinerja pemerintah dan korupsi di wilayah elite politik membuat terjadinya kegagalan pembangunan ekonomi serta demokratisasi sehingga menyebabkan rendahnya kepercayaan masyarakat Afghanistan terhadap pemerintah. Karena disaat anggaran dana internasional yang masuk yang akan digunakan sebagai alokasi rekonstruksi negara digunakan tanpa penanggungjawab serta keterbukaan sehingga dapat memberikan peluang bagi penguasa untuk mendapatkan keuntungan yang cukup besar dari hasil suap maupun penggelapan pajak<sup>32</sup>.

Setelah Taliban mengambil alih kekuasaan di Afghanistan pada Agustus 2021, aset-aset Afghanistan sebesar miliaran dollar di luar negeri dibekukan oleh Bank Sentral AS dan bank-bank sentral Eropa. Afghanistan juga terpukul akibat ketiadaan dana bantuan asing. Padahal dana tersebut menopang tiga per empat anggaran belanja negara. Dana Moneter Internasional (IMF) menyatakan bahwa Afghanistan tidak akan lagi bisa mengakses pinjaman dari lembaga

---

<sup>29</sup> *Ibid*, hal. 133

<sup>30</sup> Unit Nations Development Programme Afghanistan, *Op. Cit*, hal. 4

<sup>31</sup> *Ibid*, hal.7

<sup>32</sup> Yon Machmudi, *Op. Cit*, hal. 132

kreditur dunia itu. Tahun 2021 IMF memperingatkan ekonomi Afghanistan bisa menyusut 30% yang mengakibatkan jutaan orang di Afghanistan dapat mengalami kemiskinan dan menyebabkan krisis kemanusiaan<sup>33</sup>.

#### **d. Sosial Budaya**

Pengambilalihan Taliban semakin mewujudkan perpecahan dan persaingan global antara dua kelompok teroris. Taliban yang berfokus pada negara-bangsa Afghanistan, tidak seperti kekhalifahan ISIS, yang memiliki agenda global. Bahkan perlindungan Taliban terhadap komunitas Syiah pada dasarnya bertentangan dengan ISIS, yang menganggap mereka berada di luar Islam. Terdapat faksi Taliban yang memungkinkan terjadinya perlawanan, seperti masuknya Islamic State Khorasan Province (ISKP) atau ISIS-K merupakan kelompok yang berfalsifikasi dengan ISIS di Afghanistan dan Pakistan<sup>34</sup>. Rumor terkait perempuan juga disoroti dengan danya Taliban yang mulai mengambil alih kembali kekuasaan Afghanistan. Yang dimana awal kekuasaan Taliban mereka menjanjikan akan menjamin hak-hak para perempuan. Namun pada kenyataannya Taliban tidak menunjukkan langkah mereka dalam kebijakan yang sudah dijanjikan<sup>35</sup>. Sebelum munculnya Taliban, perempuan di Afghanistan dilindungi oleh pemerintah dibawah perlindungan hukum yang berlaku dan diberikan hak-hak dalam hidup bermasyarakat di Afghanistan serta mulai menerima haknya dalam hal berpendapat dalam politik dan memiliki hak pilih. Yang kemudian, perempuan di Afghanistan diberikan hukum dasar kuat dalam konstitusi yang berkaitan dengan kesetaraan gender<sup>36</sup>.

Di bawah sistem otoriter Taliban di Afghanistan yang tidak memiliki representasi etnis, ideologis, dan gender dapat menyebabkan orang kehilangan rasa partisipasi karena mereka tidak melihat diri mereka terwakili dalam struktur pemerintahan. Ideologi Taliban dengan jelas mendefinisikan peran perempuan dalam masyarakat. Implementasi yang ketat dari interpretasi ini berarti ada toleransi yang jauh lebih sedikit untuk melibatkan perempuan dalam politik, tempat umum, dan tenaga kerja<sup>37</sup>. Keinginan Taliban menjadikan Afghanistan sebagai negara yang sesuai dengan syariat islam dan membuat kebijakan baru untuk mengatur terkait permasalahan kehidupan sehari-hari mulai dari larangan pendidikan bagi perempuan,

---

<sup>33</sup> Kadek Surya Alit Dharma Putra, *Op.Cit*, hal. 922

<sup>34</sup> Mahfuh, dkk, "Radical Ideological Narratives Following the Taliban's Takeover of Afghanistan", *Journal Counter Terrorist Trends and Analyses*, Vol. 14 No. 1, 2022, hal. 122

<sup>35</sup> Yon Machmudi, *Op. Cit*, hal. 194

<sup>36</sup> Arinta Fridha Pangestika, "Bacha Posh: Kejahatan Kemanusiaan di dalam Selimut Tradisi dan Kebudayaan Negara Afghanistan", *Journal of International Relations*, 2022, Vol. 8 No. 4, hal. 783

<sup>37</sup> Nilofar Sakhi, "The Taliban Takeover in Afghanistan and Security Paradox", *Journal of Asian Security and International Affairs*, Vol. 9 No. 3, 2022, hal. 394

membatasi mobilitas perempuan dalam bekerja hingga aturan berpakaian yang diawasi ketat oleh Taliban dimana mereka harus diwajibkan menggunakan burkak yang menutup tubuh mulai dari kepala hingga kaki.

#### **D. Kesimpulan**

Berdasarkan pada pemaparan pembahasan di bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa kepentingan Taliban dalam mengambil alih pemerintahan Afghanistan dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain struktural, politik, ekonomi/sosial, dan sosial budaya. Kemenangan Taliban dalam pengambilalihan pemerintahan Afghanistan di tahun 2021 dibuktikan dengan banyaknya distrik maupun wilayah Afghanistan yang di kuasai oleh Taliban serta lemahnya kekuatan militer Afghanistan. Ketergantungan pemerintah Afghanistan kepada Amerika Serikat menjadi celah kelemahan dalam keamanan negara yang di sebabkan karena kekosongan di pemerintah Afghanistan. Hal tersebut karena Ashraf Ghani mengambil keputusan dengan memilih untuk meninggalkan negara Afghanistan. Proses Taliban mengambil alih kekuasaan Afghanistan dimulai dengan menyebarkan doktrin-doktrin politik kepada masyarakat serta menguasai sebagian besar daerah di Afghanistan. Taliban mulai pergerakannya ketika terciptanya perjanjian damai 29 Februari 2020 di Doha, Qatar yang sudah disepakati antara Amerika Serikat dan Taliban, ini menjadi titik balik Taliban dalam memanfaatkan situasi politik guna untuk mengambilalih pemerintahan Taliban pasca militer Amerika di tarik mundur dari Afghanistan dikarenakan pembengkakan biaya, akibatnya Taliban menginfasi camp militer amerika dan menjarah alusista militer untuk menyerang Ibukota Kabul dan mengambil alih pemerintahan Afghanistan. Beberapa dewan pemerintah juga tidak luput dari korupsi hal ini yang menyebabkan situasi ekonomi yang tumpang tindih, perluasan ekonomi tidak merata yang mengakibatkan banyak masyarakat yang miskin dan kelaparan.

Melemahnya ekonomi Afghanistan pada masa kepemimpinan Ahsraf Ghani yang berdampak pada pengurangan bantuan terhadap perekonomian, pembekuan aset, hingga kondisi sosial menjadi salah satu faktor dari keinginan Taliban mengambil alih kekuasaannya karena Taliban ingin memulihkan ekonomi mereka. Idiologi yang ekstrim menjadi kekhawatiran pemerintah afghanistan maupun dunia internasional mengingat hubungan taliban dengan ISIS di beberapa dekade terakhir, dan kebijakan-kebijakan yang diterapkan Taliban ditakutkan menjadikan Taliban menjadi negara yang semakin terisolasi dan terbelakang. Keinginan Taliban menjadikan Afghanistan sebagai negara yang sesuai dengan syariat islam dan membuat

kebijakan baru untuk mengatur terkait permasalahan kehidupan sehari-hari mulai dari larangan pendidikan bagi perempuan, membatasi mobilitas perempuan dalam bekerja hingga aturan berpakaian yang diawasi ketat oleh Taliban dimana mereka harus diwajibkan menggunakan burkak yang menutup tubuh mulai dari kepala hingga kaki.

### **Daftar Pustaka**

- Andani, Rafika Wahyu, Segitiga Kekerasan, Ham, Dan Perempuan Afghanistan Era Kepemimpinan Taliban, *Jurnal Pena Wimaya Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta Program Study Hubungan Internasional*, Vol. 2 No. 1,
- Anugrah, Boy dan Jabinson Purba, Kondisi Politik dan Keamanan Afghanistan di Bawah Rezim Taliban dan Signifikansinya Terhadap Geopolitik Global, *Jurnal Kajian Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia*. Vol. 9 No. 3, 2021
- Azria, Kaiva dan Erma Ramayani, Sejarah Perang Afghanistan Dari Dulu Hingga Kini, *jurnal PIR*, Vol. 6 No. 2, 2022
- Fuadi, Ahmad Peran United Nations Assistance Mission in Afghanistan dalam Memberikan Perlindungan Hak Asasi Manusia di Afghanistan pada Tahun 2009, *Jom FISIP*, Vol. 1 No. 2, 2014
- Jemadu, Alexius, *“Politik Global dalam Teori & Praktik”*, Yogyakarta: Graha Ilmu, Yogyakarta, 2008
- Machmudi, Yon, *Era Baru Afghanistan: Invasi Barat Hingga Kemenangan Taliban*, Gema Insani, Jakarta, 2021
- Mahfuh, dkk, Radical Ideological Narratives Following the Taliban’s Takeover of Afghanistan, *Journal Counter Terrorist Trends and Analyses*, Vol. 14 No. 1, 2022
- Murdiyanto, Eko, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Aplikasi Contoh Proposal*, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta Press, Yogyakarta, 2020
- Nafisah, Durrotun, Afghanistan Di Bawah Pemerintahan Taliban Tahun 1996-2001 M, Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2019
- Nainggolan, Poltak Partogi, Taliban Merebut Kembali Kekuasaan di Afghanistan, *Jurnal Info Singkat*, Vol. 8 No. 16, 2021
- Pangestika, Arinta Fridha, Bacha Posh: Kejahatan Kemanusiaan di dalam Selimut Tradisi dan Kebudayaan Negara Afghanistan, *Journal of International Relations*, Vol. 8 No. 4, 2022
- Putra, Kadek Surya Alit Dharma, Aneksasi Afghanistan Terhadap Taliban Tahun 2021, *Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum*, Vol. 4 No. 3, 2021

Sakhi, Nilofar, The Taliban Takeover in Afghanistan and Security Paradox, *Journal of Asian Security and International Affairs*, Vol. 9 No. 3, 2022

Umam, Khotibul, Kebijakan Ashraf Ghani Terhadap Kembali Berkuasanya Kelompok Taliban di Afghanistan Tahun 2021, *International Conference on Islam, Law, and Society*, Vol. 1 No.1, 2021

Umami, Liza, Analisa Politik Luar Negeri Afghanistan Terhadap Indonesia dalam Upaya Mediasi Konflik Afghanistan Tahun 2017-2019, Skripsi, Fakultas Adab Dan Humaniora Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2020

Unit Nations Development Programme Afghanistan, *Afghanistan: Socio-Economic Outlook 2021-2022*, UNDP Afghanistan County Office, Afghanistan, 2021

### **Web/Internet**

<https://cisac.fsi.stanford.edu/mappingmilitants/profiles/afghan-taliban>, diakses pada 17 Mei 2023

<https://internasional.kontan.co.id/news/ini-sejarah-taliban-kelompok-yang-kini-menguasai-afghanistan-1> diakses pada 4 Februari 2023

<https://www.bbc.com/indonesia/dunia-58200920> diakses pada 3 Juni 2022

<https://www.longwarjournal.org/mapping-taliban-control-in-afghanistan>, diakses pada 17 Mei 2023

[https://www.researchgate.net/publication/362709803\\_Krisis\\_Afghanistan\\_dan\\_Implikasi\\_Terhadap\\_Politik\\_Global](https://www.researchgate.net/publication/362709803_Krisis_Afghanistan_dan_Implikasi_Terhadap_Politik_Global) diakses pada 8 Februari 2023

<https://www.voaindonesia.com/a/ghani-mengaku-lari-dari-afghanistan-untukhindari-pertumpahan-darah-/6218093.html>, diakses pada 5 Mei 2023